

### **2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok Sasaran Layanan antara lain kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BUMD, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, dan Instansi Vertikal.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan yang responsif gender sebagai upaya dalam menyediakan layanan yang adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan gender, seperti adanya mekanisme Pengaduan yang Efektif yang menyediakan pengaduan yang aman bagi masyarakat.

## **2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan *Stunting* yang Masih Tinggi;
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal;
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal;
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal;
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal;
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal;
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah;
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan;
9. Reformasi Birokrasi.

Permasalahan lain terkait kinerja tata kelola pemerintah dapat dilihat dari capaian SAKIP yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 78,25 meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan nilai minimum capaian tertinggi kategori “AA” sebesar 90, maka masih ada selisih sebesar 11,75. Artinya kinerja tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan masih harus ditingkatkan demi perwujudan *good governance* yang menandakan seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

### **2.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Proses mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan rencana strategis merupakan suatu hal yang sangat krusial, mengingat objektivitas dalam proses identifikasi permasalahan yang terjadi dan mungkin akan terjadi dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Teknis Perencanaan dan Evaluasi RPJPD dan RPJMD, pendekatan dalam identifikasi permasalahan dimana dalam proses penyusunannya dilakukan secara berjenjang dari permasalahan yang bersifat umum kepada permasalahan permasalahan yang bersifat khusus dan spesifik, dengan urutan peta permasalahan yang terbagi atas isu strategis, masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagian Sekretariat**

- a. Belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai yaitu Gedung yang *representative*, dilengkapi dengan ruang rapat dan tempat penyimpanan dokumen yang memadai, serta parkir yang bisa mengakomodir kendaraan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Perlunya peningkatan dan optimalisasi kualitas SDM dalam menunjang peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

#### **2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah**

**Belum Optimalnya Kualitas Penganggaran Daerah, seperti :**

- a. Penetapan APBD belum tepat waktu;
- b. Proses Penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku;
- c. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan terkait Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*.
- d. Sering terjadinya perubahan tentang aturan penganggaran dalam satu tahun anggaran;

- e. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
- f. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD Kabupaten/Kota memiliki kendala pada saat penerbitan SK Evaluasi Kabupaten/Kota yang tidak tepat waktu, hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan eksekutif dan legislatif.

### **3. Bidang Perbendaharaan Daerah**

#### **Belum Optimalnya Kualitas Perbendaharaan Daerah, seperti :**

- a. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;
- b. Masih tidak berjalannya *Revolving* Uang Persediaan (UP) di beberapa SKPD;
- c. Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;
- d. Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank;
- e. Perlunya koordinasi secara simultan antara Pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran kas SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, dan Bank;
- f. Belum adanya mekanisme penerbitan SP2D untuk kelebihan pembayaran;
- g. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
- h. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran;
- i. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan;
- j. Masih kurangnya pengetahuan para bendahara tentang sistem pengelolaan keuangan.

### **4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

#### **Belum Optimalnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah, seperti :**

- a. Kapasitas SDM pengelola keuangan di OPD masih belum optimal menyebabkan terlambatnya penyusunan laporan keuangan;
- b. Masih terdapat OPD yang belum tanggap dan anggaran yang belum terserap dengan maksimal di beberapa urusan/perangkat daerah;
- c. TP-TGR yang belum terselesaikan.

## **5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

### **Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti :**

- a. Kapasitas SDM pengurus barang di OPD masih belum optimal menyebabkan terlambatnya pelaporan;
- b. Integritas dan kepedulian kepala OPD selaku pengguna barang masih rendah;
- c. Belum semua aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersertifikat dan belum semua aset tanah dipasang papan kepemilikan aset;
- d. Lamanya waktu proses pengajuan pemanfaatan hingga selesai perjanjian;
- e. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan BMD dalam perencanaan anggaran Pemerintah Daerah (tidak sinkronisasi perencanaan);
- f. Belum optimalnya perencanaan fisik dan hukum BMD;
- g. Minimnya Dokumen Sumber pada Basis Data;
- h. Masih terdapat aset yang tercatat namun tidak diketahui kondisi fisik dan keberadaannya;
- i. Masih banyak aset *idle*;
- j. Kurangnya Kepedulian dalam Pengamanan Aset.

**Tabel 2.8**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

| No. | Masalah Pokok                                         | Masalah                                                               | Akar Masalah                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1.1 Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan keuangan daerah             | 1.1.1 Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal penyusunan anggaran, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan.       |
|     |                                                       |                                                                       | 1.1.2 Adanya koreksi terhadap APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri seperti Pemenuhan Belanja <i>Mandatory Spending</i> , Proyeksi terhadap SILPA APBD |
|     |                                                       |                                                                       | 1.1.3 Kepatuhan dalam proses perencanaan anggaran dengan menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal Penyusunan APBD                                                                         |
|     |                                                       |                                                                       | 1.1.4 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan, sangat tergantung pengelola keuangan di OPD, sehingga membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya.                                                        |
|     |                                                       | 1.2 Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi.                | 1.2.1 Pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan peraturan perundangundangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadaptasi         |
| 2.  | Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah      | 1.3 Kualitas Tata Kelola Organisasi Perangkat yang harus ditingkatkan | 1.3.1 Kinerja perangkat daerah yang harus ditingkatkan                                                                                                                                         |
|     |                                                       | 2.1 Belum optimalnya penyelesaian permasalahan aset                   | 2.1.1 Belum Optimalnya Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan BMD                                                                                                                            |
|     |                                                       |                                                                       | 2.1.2 Belum Optimalnya Pemanfaatan BMD                                                                                                                                                         |
|     |                                                       |                                                                       | 2.1.3 Belum Optimalnya Inventarisir BMD                                                                                                                                                        |

**2.2.2 ISU STRATEGIS**

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumatera Selatan menjadi provinsi berdaya saing, tangguh, inovatif dan adil. Sumatera Selatan sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, Visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah:

**“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”**

## a. *Visi*

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**Sumsel** memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk provinsi ini berjumlah 8.889.913 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-14, memiliki luas 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan.

**Maju** bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

**Terus** bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

**Semua** mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh.

## b. Misi

Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

**6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.**

7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Merujuk pada misi diatas, dapat dilihat bahwa misi yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan didukung oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan adalah *Misi 6*

Penerjemahan visi dan misi daerah tersebut menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, dimana **tujuan** pembangunan daerah Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah
3. Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air
4. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan
5. Meningkatnya Kualitas Konektivitas Daerah
6. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat
7. Meningkatnya Pengelolaan Bencana
8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

#### **9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan**

10. Terwujudnya Stabilitas Sosial

***Yang akan diwujudkan melalui 20 (dua puluh) sasaran, yaitu:***

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan
3. Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan
4. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
5. Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah
6. Meningkatnya Investasi dan Perdagangan
7. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
8. Meningkatnya Ketahanan Pangan, energi, dan air
9. Meningkatnya Pengembangan Hilirisasi Berbasis Sektor Unggulan (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan)
10. Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
11. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas
12. Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi
13. Meningkatnya Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman yang Layak
14. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana
15. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha
16. Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial

#### **17. Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi**

18. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
19. Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
20. Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

Selanjutnya mengacu pada visi misi Pemerintah Daerah, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan pilihan strategi pembangunan. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 :

**Tabel 2.9**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun 2025-2029**

| Misi RPJMD                                                                                                                                       | Tujuan RPJMD                         | Sasaran RPJMD                                   | Indikator Sasaran | OPD   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>MISI 6:</b><br><br>Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan | Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi | Opini BPK         | BPKAD |

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2026

Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait langsung dengan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Opini BPK”**. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**2.2.2.a Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri**

Dalam penyusunan Rencana Strategis dilakukan telaah terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **a. Kementerian Keuangan RI**

Visi Kementerian Keuangan RI adalah menjadi Pengelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dunia yang Adil dan Transparan untuk Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Layanan publik serta Daya Saing Daerah untuk Mendukung Visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

#### **b. Kementerian Dalam Negeri RI**

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah Terwujudnya Pemerintahan Dalam Negeri yang Aman, Efektif, dan Demokratis. Misi Kementerian Dalam Negeri RI meliputi : memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri, meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, namun tidak ada implikasi terhadap kebutuhan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.2.2.b Penentuan Isu Strategis**

Berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di atas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mendukung pencapaian misi pembangunan ke enam yaitu ***“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”*** tujuan ke sembilan yaitu ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan”*** dan sasaran ke tujuh belas yaitu ***“Meningkatnya kualitas dan kapabilitas birokrasi”***

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang didasarkan pada capaian evaluasi selama 5 (lima) tahun terakhir, terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian seperti :

1. Kepatuhan terhadap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.

Dengan mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa APBD dapat disusun dan disahkan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun konsekuensi jika terjadi keterlambatan pengesahan APBD adalah implementasi APBD menjadi tertunda. Dampaknya, serapan anggaran menjadi terlambat atau kualitas realisasinya menjadi rendah.

2. Penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan (*Budget execution*).

Dengan menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Adapun performa realisasi anggaran pemerintah daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan tingkat realisasi sebesar 8,71% (2020), 5,23% (2021), 0,05% (2022), 7,17% (2023), -2,87% (2024).

3. Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*.

Capaian Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* Tahun 2024 sebesar 29,13%. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara bertahap akan menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan melalui Surat Edaran kepada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung kesetaraan gender. Adapun jika belanja *Mandatory Spending* terpenuhi maka akan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

4. Konsistensi terhadap penganggaran Belanja Pegawai di Luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD.

Bahwa amanat dari Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD. Pemerintah Daerah diberi waktu hingga 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan, atau 5 (lima) tahun dari tahun 2022, untuk mencapai proporsi tersebut. Adanya pengaturan proporsi belanja pegawai ini tidak lepas dari usaha untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas layanan publik dan pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Melakukan perhitungan prognosis belanja dan pembiayaan dengan cermat untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan. Adapun Rasio SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar (0,93%) mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2020 (1,14%), 2022 (3,10%) dan Tahun 2023 (1,38%).

SILPA cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda.

6. Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Periode penyelesaian laporan keuangan menunjukkan bagaimana pemerintah daerah menyelesaikan laporan keuangan. Semakin tepat waktu, semakin cepat pula pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan dan semakin cepat pula BPK RI dapat melihat laporan tersebut.

Pemerintah daerah yang memperoleh opini yang baik dapat dilihat melalui kinerja dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tidak terdapat temuan yang tidak sesuai dan tidak wajar dalam laporan keuangannya.

7. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah seperti meningkatkan kualitas tata kelola BMD melalui Indeks Pengelolaan Aset yang merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan aset pemerintah daerah.

Berdasarkan pada telaahan di atas, maka isu strategis pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .

Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan seluruh SKPD sebagai perangkat daerah. Oleh karena it, komitmen bersama adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam mewujudkannya.

2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan terbuka dalam menyediakan informasi keuangan kepada publik seperti Pemenuhan alokasi belanja *Mandatory Spending* dengan menyusun perencanaan anggaran yang tepat sesuai dengan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan perspektif gender.

3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengoptimalkan penyelesaian permasalahan aset.

**Tabel 2.10**  
**Isu Strategis BPKAD Provinsi Sumatera Selatan**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN                                                            | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH                                          | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                    | ISU STRATEGIS                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                         |                                                                                        | GLOBAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NASIONAL | REGIONAL                                                                                                           |                                                                                                                     |
| (1)                                                     | (2)                                                                     | (3)                                                                                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (5)      | (6)                                                                                                                | (7)                                                                                                                 |
| Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah       | 1. Mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Belum Optimalnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan aset Pemerintah Daerah | Cyber Insecurity. Keamanan siber. Seiring dengan semakin terintegrasinya teknologi dalam kehidupan sehari-hari, ancaman siber juga semakin kompleks dan canggih. Keamanan siber juga menjadi salah satu isu strategis dalam jangka menengah yang sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. | -        | Peningkatan efisiensi dan alokasi belanja berkualitas yang menjadi faktor kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. | 1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan WTP atas Laporan Keuangan dan Aset Daerah.                       |
|                                                         | 2. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                    | 2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. |
|                                                         |                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                    | 3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengoptimalkan penyelesaian permasalahan aset       |

### 2.2.2.c Telaahan Perspektif Gender

Berdasarkan Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, pada asta cita keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1 Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan yaitu 5 (lima) tahun, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih oleh perangkat daerah pada akhir tahun perencanaan.

Adapun Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempedomani Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yaitu :

##### ***“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”***

Tujuan tersebut merupakan salah satu wujud nyata Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk berkomitmen dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel guna menghindari kurangnya kepercayaan masyarakat yang disebabkan oleh pengelolaan keuangan dan aset yang tidak transparan dan akuntabel. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel akan berdampak pada Laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya, informasi keuangan menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh publik, pengendalian internal menjadi lebih efektif dalam mengelola keuangan daerah, risiko keuangan seperti penyalahgunaan dana dan kesalahan pengelolaan keuangan dapat diminimalkan.

##### **3.2 Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk itu sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis 2025-2029 adalah :

a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah adalah dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi.

Adapun indikator sasaran yang akan dicapai pada adalah :

- 1) Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Indikator ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan efektif dan efisien, serta memenuhi kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku.

- 2) Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*).

Indikator ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mengelola belanja daerah dengan efektif dan efisien, serta meminimalkan deviasi antara anggaran dan realisasi belanja.

b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah sangat penting sebagai wujud untuk :

- 1) **Mengoptimalkan Aset.** Pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan aset daerah dan meningkatkan efisiensi.
- 2) **Mengurangi Kerugian.** Pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset daerah.
- 3) **Meningkatkan Transparansi.** Pengelolaan barang milik daerah yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholders*.
- 4) **Mendukung Pelayanan Publik.** Pengelolaan aset yang baik dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- 5) **Mengoptimalkan Pendapatan.** Pengelolaan aset yang efektif dapat mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset yang optimal.
- 6) **Meningkatkan Akuntabilitas.** Pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola aset publik.

Adapun indikator sasaran yang akan dicapai pada adalah Indeks Pengelolaan Aset. Dengan mengukur Indeks Pengelolaan Aset, pemerintah daerah dapat menilai kinerja pengelolaan aset dan mengidentifikasi area perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun 2025-2029**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN            | TUJUAN BPKAD                                                                               | SASARAN BPKAD                                            | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                  | BASELINE | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE |       |       |       |       |       | KONDISI AKHIR |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|                                                |                                                                                            |                                                          |                                                                                           | 2024     | 2025                                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik | Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel | 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah     | Opini BPK atas Laporan Keuangan                                                           | WTP      | WTP                                         | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP           |
|                                                |                                                                                            |                                                          | - Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.        | 100%     | 100%                                        | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%          |
|                                                |                                                                                            |                                                          | - Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD ( <i>Budget Execution</i> ) | -2,87%   | 5%                                          | 5%    | 5%    | 5%    | 5%    | 5%    | 5%            |
|                                                |                                                                                            | 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | - Indeks Pengelolaan Aset                                                                 | 2,13%    | 2,15%                                       | 2,18% | 2,19% | 2,20% | 2,21% | 2,22% | 2,22%         |

**Tabel 3.2 Definisi Operasional**

| INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                           | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUMUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Opini BPK atas Laporan Keuangan                                                  | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah predikat tertinggi yang diberikan kepada laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan secara wajar dan material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tanpa ada masalah signifikan yang perlu dikecualikan. Sumber : BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). | Kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut BPK RI adalah :<br><br>1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)<br>Laporan keuangan harus sesuai dengan SAP yang berlaku, yang berarti disajikan secara wajar dan memadai sesuai aturan akuntansi yang ditetapkan.<br><br>2. Kecukupan Pengungkapan<br>Informasi keuangan dalam laporan harus diungkapkan secara cukup dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibuat.<br><br>3. Sistem Pengendalian Internal Memadai<br>Entitas yang diperiksa harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan.<br><br>4. Tidak Ada Salah Saji Material<br>Tidak terdapat kesalahan atau kekurangan yang material dalam laporan keuangan. Jika ada, dampaknya tidak signifikan dan tidak memengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan. |
| - Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. | APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan<br><br>- Kepala Daerah dan DPRD wajib melaksanakan penyusunan APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD                                                                                                | $\frac{\text{Dokumen APBD Perubahan Tahun } n \text{ Tepat Waktu} + \text{Dokumen APBD Induk Tahun } n+1 \text{ Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                  | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUMUS                                                                                                                                      |  |     |        |             |             |             |      |             |       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD ( <i>Budget Execution</i> ) | Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal (Pedum LPPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\left[ \left[ \frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \right] - 1 \right] \times 100\%$ |  |     |        |             |             |             |      |             |       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Indeks Pengelolaan Aset                                                                 | <div>Mengukur kualitas tata kelola BMD melalui Indek Pengelolaan Aset</div> <div><table><tr><th colspan="2">Konversi IPA ke Dalam Indeks</th></tr><tr><th>IPA</th><th>Indeks</th></tr><tr><td>3 &lt; IPA ≤ 4</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>2 &lt; 1PA ≤ 3</td><td>Baik</td></tr><tr><td>1 &lt; IPA ≤ 2</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>IPA ≤ 1</td><td>Buruk</td></tr></table></div> | Konversi IPA ke Dalam Indeks                                                                                                               |  | IPA | Indeks | 3 < IPA ≤ 4 | Sangat Baik | 2 < 1PA ≤ 3 | Baik | 1 < IPA ≤ 2 | Cukup | IPA ≤ 1 | Buruk | <div>1. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan Produktif</div> <div><b>ST. 1.2 = NP.1.1.2 + NP.1.2.2</b></div> <div>2. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan</div> <div><b>ST.2.2 = NP.2.3.2 + NP.2.4.2 + NP.2.5.2</b></div> <div>3. Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif</div> <div><b>ST.3.2 = NP.3.6.2 + NP.3.7.2</b></div> <div>4. Administrasi BMD yang Andal</div> <div><b>ST.4.2 = NP.4.8.2</b></div> |
| Konversi IPA ke Dalam Indeks                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |  |     |        |             |             |             |      |             |       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IPA                                                                                       | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |  |     |        |             |             |             |      |             |       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 < IPA ≤ 4                                                                               | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |  |     |        |             |             |             |      |             |       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 < 1PA ≤ 3                                                                               | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |  |     |        |             |             |             |      |             |       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 < IPA ≤ 2                                                                               | Cukup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |  |     |        |             |             |             |      |             |       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IPA ≤ 1                                                                                   | Buruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |  |     |        |             |             |             |      |             |       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### **3.3 Strategi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Dalam merumuskan strategi apa yang akan ditempuh oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan Analisa SWOT terhadap beberapa poin strategis yang berkaitan dengan faktor internal berupa *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan), serta faktor eksternal berupa *Opportunity* (Peluang) dan *Treath* (Ancaman)

#### **a. *Strenght* (Kekuatan)**

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan;
2. Memiliki posisi strategis sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang antara lain melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, serta sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
3. Memiliki posisi strategis antara lain melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan cukup tinggi (mayoritas pegawai lulusan S1 dan S2).

#### **b. *Weakness* (kelemahan)**

1. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan terkait Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*.
2. Belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai yaitu Gedung yang *representative*, dilengkapi dengan ruang rapat dan tempat penyimpanan dokumen yang memadai, serta parkir yang bisa mengakomodir kendaraan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
4. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

c. *Opportunity* (peluang)

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
2. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat sebagai salah satu *tools* untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Pembangunan Predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM merupakan bentuk komitmen yang kuat dalam menjalankan Reformasi Birokrasi yang nyata dari seluruh jajaran.

d. *Treath* (Ancaman)

1. Peraturan perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan sehingga menyulitkan dalam implementasi;
2. Pengakuan dari masyarakat terhadap aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara berpihak.

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal sebagaimana diatas, maka dapat disusun strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menunjang proses pengelolaan keuangan dan aset dengan merujuk pada Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Strategi Renstra BPKAD Tahun 2025-2029**

| TUJUAN                                                                                                                      | SASARAN STRATEGIS                                        | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Indikator<br><i>Indikator : Opini BPK</i> | 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>- Mempedomani Kebijakan Umum Belanja Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD</li> <li>- Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan.</li> <li>- Pemenuhan Belanja <i>Mandatory Spending</i> dengan perencanaan anggaran yang mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik yang responsif gender.</li> <li>- Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan yang terpadu agar dapat dicapai kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan</li> </ul> |
|                                                                                                                             | 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi dalam Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah</li> <li>- Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah</li> <li>- Optimalisasi Inventarisir Barang Milik Daerah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3.4 Penahapan Pembangunan

**Tabel 3.4 Penahapan Pembangunan**

| TUJUAN<br>RENSTRA                                                                 | SASARAN STRATEGIS                                    | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                            | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                            | PENTAHAPAN                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | TAHAP I (2026)                                                                                  | TAHAP II (2027)                                                                                 | TAHAP III (2028)                                                                                | TAHAP IV (2029)                                                                                               | TAHAP (V) 2030                                                                                                                |
| Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel | 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | - Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan                                                                                                                                                 | - Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Pemenuhan Belanja Mandatory Spending secara bertahap                                            | Pemenuhan Belanja Mandatory Spending secara bertahap                                            | Belanja Mandatory Spending sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan           | Belanja Mandatory Spending sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                         | Belanja Mandatory Spending sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                         |
|                                                                                   |                                                      | - Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan | - Melakukan evaluasi subkegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan <i>mandatory spending</i> seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender                            | Pembaharuan Regulasi terkait Standar dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah                  | Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                   | Peningkatan Cakupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi                       | Penguatan Mekanisme Konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan |
|                                                                                   |                                                      | - Pemenuhan Belanja <i>Mandatory Spending</i> dengan perencanaan anggaran yang mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik yang responsif gender.                                                                                                                         | - Melaksanakan perencanaan penganggaran, akuntansi pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan secara akuntabel dan transparan                                                                    | Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri | Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri | Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri | Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri               | Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri                               |
|                                                                                   |                                                      | - Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan yang terpadu agar dapat dicapai kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan                                                                                                | - Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah                                                                                | Penyusunan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah                        | Sosialisasi terkait kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah                       | Bimbingan teknis terkait kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah                  | Evaluasi terkait kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah                                        | Pembinaan terkait kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah                                                       |
|                                                                                   |                                                      | - Mempedomani Kebijakan Umum Belanja Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD                                                                                                                                                                              | - Koordinasi yang baik dan komitmen antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti SKPD dan DPRD untuk menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal                                                                                  | Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah                                    | Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah                                    | Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah                                    | Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah                                                  | Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah                                                                  |
|                                                                                   |                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Adanya komitmen bersama antara Gubernur Sumatera Selatan, DPRD dan Kementerian dalam upaya pemenuhan alokasi belanja <i>Mandatory Spending</i>                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                               |
|                                                                                   |                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Peningkatan SDM di antaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi, bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                               |

| TUJUAN<br>RENSTRA | SASARAN STRATEGIS                                        | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                             | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENTAHAPAN                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAHAP I (2026)                                                | TAHAP II (2027)                                               | TAHAP III (2028)                                              | TAHAP IV (2029)                                               | TAHAP (V) 2030                                                |
|                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      | - Lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis, belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|                   | 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi dalam Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah</li> <li>- Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah</li> <li>- Optimalisasi Inventarisir Barang Milik Daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Pengamanan dan Pengawasan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Badan Pertanahan Nasional</li> <li>- Melakukan pendataan terhadap aset <i>idle</i> yang belum dioptimalkan yang dapat dimanfaatkan untuk dikerjasamakan</li> <li>- Melakukan penataan pencatatan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan melaksanakan aplikasi E-BMD yang terintegrasi dengan SIPD RI sehingga data yang diperoleh lebih akuntabel dan informatif</li> <li>- Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait</li> </ul> | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu  | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu  | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu  | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu  | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu  |
|                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penertiban Barang Milik Daerah                                | Penertiban Barang Milik Daerah                                | Penertiban Barang Milik Daerah                                | Penertiban Barang Milik Daerah                                | Penertiban Barang Milik Daerah                                |
|                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik | Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik | Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik | Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik | Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik |
|                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Optimalisasi Pemanfaatan BMD                                  | Optimalisasi Pemanfaatan BMD                                  | Optimalisasi Pemanfaatan BMD                                  | Optimalisasi Pemanfaatan BMD                                  | Optimalisasi Pemanfaatan BMD                                  |

### **3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Peran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah sebagaimana *mandatory* dari peraturan perundang-undangan, sebagai sebuah acuan dalam penyusunan dan operasionalisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu disusun arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam periode 5 Tahun ke depan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

**Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

| NO  | OPERASIONALISASI NSPK                                                                                                                                                          | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                                                                                    | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                            | (3)                                                                                                                                                     | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)        |
| 1)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Melakukan evaluasi subkegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan mandatory spending seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender</li> <li>- Melaksanakan perencanaan penganggaran, akuntansi pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan secara akuntabel dan transparan</li> <li>- Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah</li> <li>- Koordinasi yang baik dan komitmen antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti SKPD dan DPRD untuk menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal</li> <li>- Adanya komitmen bersama antara Gubernur Sumatera Selatan, DPRD dan Kementerian dalam upaya pemenuhan alokasi belanja Mandatory Spending</li> <li>- Peningkatan SDM di antaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi, bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya</li> <li>- Peningkatan SDM di antaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi, bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya</li> <li>- Lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis, belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.</li> <li>- Meningkatkan Pengamanan dan Pengawasan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Badan Pertanahan Nasional</li> <li>- Melakukan pendataan terhadap aset <i>idle</i> yang belum dioptimalkan yang dapat dimanfaatkan untk dikerjasamakan</li> <li>- Melakukan penataan pencatatan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan melaksanakan aplikasi E-BMD yang terintegrasi dengan SIPD RI sehingga data yang diperoleh lebih akuntabel dan informatif</li> <li>- Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait</li> </ul> |            |